



**Edukasi Anti-Korupsi Sejak Dini: Menumbuhkan Kesadaran Di Kalangan Generasi Muda**

Abd. Chaidir Marasabessy<sup>1\*</sup>, Amrizal Siagian<sup>2</sup>, Abi Robian<sup>3</sup>, Nur Aprilia Wulandari<sup>4</sup>,  
Sheella Mega Cantika<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia*

<sup>4,5</sup>*Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Pamulang, Tangerang Selatan*

Email:

<sup>1</sup>dosen02633@unpam.ac.id, <sup>2</sup>dosen00711@unpam.ac.id, <sup>3</sup>dosen00900@unpam.ac.id

**ABSTRAK**

Pengembangan budaya anti-korupsi dengan membangun budaya jujur dan berintegritas sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas sangat dibutuhkan. Kegiatan pengabdian ini bermaksud mengembangkan karakter jujur, melalui serangkaian kegiatan interaktif seperti simulasi, diskusi kelompok, dan permainan edukatif, dengan tujuan agar nilai-nilai ini tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga diinternalisasi dan dipraktikkan; Menanamkan pemahaman bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi penting dalam membangun identitas nasional yang kuat dan bermartabat; dan memberdayakan generasi muda untuk menjadi "duta anti-korupsi" atau agen perubahan di lingkungan pendidikan dan keluarga mereka. Kegiatan dilakukan dengan ceramah/sosialisasi, simulasi/role playing, dan diskusi (tanyajawab). Metode ini dirancang untuk menciptakan siklus yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa berdasarkan analisis perbandingan antara nilai rata-rata pre-test dan post-test yang dilakukan pada 50 peserta, didapati adanya peningkatan skor rata-rata sebesar 25%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode dan materi yang disampaikan efektif dalam mentransfer pengetahuan dasar tentang korupsi. Hasil kuesioner perubahan sikap menunjukkan bahwa 85% peserta termotivasi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab setelah mengikuti kegiatan. Dari total peserta, sebanyak 10 peserta terpilih sebagai "Duta Anti-Korupsi Sekolah". Selain itu, video dan poster kampanye hasil karya siswa juga menjadi luaran yang dapat digunakan sebagai alat diseminasi efektif di media sosial.

**Kata Kunci : Edukasi, Anti-Korupsi, Menumbuhkan Kesadaran, Remaja**

**ABSTRACT**

*The development of an anti-corruption culture by fostering a culture of honesty and integrity from an early age, whether in the family, school or wider community, is greatly needed. This community service activity aims to develop honest character through a series of interactive activities such as simulations, group discussions and educational games, with the aim that these values are not only understood theoretically, but also internalised and practised. Instilling an understanding that honesty and integrity are important foundations in building a strong and dignified national identity; and empowering the younger generation to become 'anti-corruption ambassadors' or agents of change in their educational and family environments. Activities were carried out through lectures/socialisation, simulations/role playing, and discussions (question and answer sessions). This method is designed to create a structured cycle, starting from planning, implementation, and measurable evaluation. The evaluation results show that based on a*

*comparative analysis between the average pre-test and post-test scores of 50 participants, there was an increase in the average score of 25%. This increase shows that the methods and materials presented were effective in transferring basic knowledge about corruption. The attitude change questionnaire results showed that 85% of participants were motivated to behave honestly and responsibly after participating in the activity. Of the total participants, 10 participants were selected as 'Anti-Corruption Ambassadors'.*

**Keywords : Education, Anti-Corruption, Raising Awareness, Youth**

## **PENDAHULUAN**

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah lama menjadi tantangan fundamental yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia diberbagai sektor (Mallawa & Damayanti, 2023). Efek domino dari praktik tercela ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak tatanan moral, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menyadari kompleksitas dan akar masalah korupsi, upaya pemberantasannya tidak bisa hanya berfokus pada penindakan hukum, melainkan harus dimulai dari hulu, yaitu dengan membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada generasi penerus bangsa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Edukasi Anti-Korupsi Sejak Dini: Menumbuhkan Kesadaran di Kalangan Generasi Muda" merefleksikan pemahaman strategis. Memilih pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarun Ni'mah Bojongsari sebagai target audiens merupakan langkah krusial, sebab mayoritas berada pada usia remaja, di

mana mereka sedang dalam fase pembentukan identitas dan sangat peka terhadap isu-isu sosial. Mereka juga merupakan calon tenaga kerja dan pemimpin masa depan yang akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi praktik korupsi di dunia kerja. Mereka lebih responsif terhadap pendekatan yang kreatif dan interaktif, di mana pola pikir, sikap, dan moralitas mereka sedang berkembang pesat dan mudah dibentuk. Oleh karena itu, edukasi di usia ini akan menjadi pondasi kuat untuk membentuk karakter mereka di masa depan (Zaman et al.,2024).

Memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi langkah strategis (Ambarwati & Assiddiq, 2022). Tujuannya bukan sekadar menghafal definisi korupsi, melainkan menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap dampak negatifnya (Inayah et al.,2025). Dengan demikian, perihal utama yang hendak diatasi oleh kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi di kalangan remaja.

Korupsi seringkali dianggap sebagai isu yang kompleks, politis, dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak remaja tidak melihat relevansi isu ini dengan tindakan mereka, seperti menyontek, atau bahkan menyuap untuk mendapatkan nilai bagus (Oruc & Celik, 2011; Hadjar, 2023). Mereka mungkin tidak menyadari bahwa perilaku-perilaku kecil ini merupakan cikal bakal dari praktik korupsi yang lebih besar di masa depan (Hadjar, 2023:1). Pada lain hal, kurikulum pendidikan formal yang belum optimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi secara mendalam, interaktif, dan aplikatif. Keterbatasan model peran (role model) yang konsisten, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun media massa, yang seringkali justru menampilkan figur yang terlibat dalam praktik-praktik tidak jujur. Nur Rohim Yunus dan kawan-kawan menyebutkan, lingkungan sosial yang masih permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang mengarah pada korupsi, seperti budaya "jalur belakang" atau pemberian "uang pelicin" (Yunus et al., 2024).

Generasi muda (pelajar /mahasiswa), sebagai bagian dari masyarakat urban yang dinamis, menghadapi paparan informasi yang

sangat tinggi. Mereka rentan terhadap berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif. Membekali mereka dengan kesadaran anti-korupsi sejak dini bukan hanya tentang mencegah mereka menjadi koruptor, tetapi lebih penting, membentuk mereka menjadi agen perubahan yang berani menolak dan melaporkan praktik korupsi, serta menjadi teladan integritas di lingkungan mereka. Adnan Topan Husodo menyebutkan bahwa sektor pendidikan merupakan lini strategis untuk menumbuhkan semangat, cara pandang, dan upaya pencegahan korupsi. Peran ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk karakter yang bermartabat dan berakhlak mulia (Wisodo et al., 2019; Hambali, 2020).

Secara nasional, isu korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit perbaikan, peringkat Indonesia masih berada di bawah ekspektasi. IPK Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2023 (Transparency International, 2021; Aiman, 2024). Sektor pendidikan juga tidak luput dari korupsi. Pada tahun

2023, ada 57 kasus korupsi dengan 128 tersangka di sektor ini. Sebagian besar kasus (54%) adalah penyalahgunaan dana bantuan sekolah, sisanya (46%) terkait pengadaan sarana dan prasarana. Korupsi ini sangat merugikan karena merusak masa depan generasi muda (Aiman, 2024).

Hal ini diperparah dengan kolusi sebuah "persekongkolan rahasia" antara oknum pejabat dan pihak swasta yang menciptakan "tahu sama tahu" untuk keuntungan pribadi, menghambat persaingan yang sehat, dan merusak tata kelola yang baik (Jisman, 2022). Sehingga persepsi korupsi dapat dikatakan sebagai indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai korupsi yang didasarkan pada pengukuran subjektif dikarenakan sifatnya yang tertutup (Hui Li et al., 2016; Rosid et al., 2017; World Bank Group Database, 2020).

Secara normatif, korupsi dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang. Dalam teori pilihan rasional (*rational choice theory*), dimana pelaku korupsi menganggap manfaat yang didapat (misalnya, kekayaan) lebih besar daripada risiko (sanksi) yang mungkin diterima (Sohail & Cavill, 2008; Hermawan & Pramana, 2022). Dalam

perspektif teori budaya (*The ethos of public administration theories*), korupsi berkembang karena budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat yang mentoleransi, bahkan mendorong, perilaku koruptif (Aiman, 2024). Sementara dalam teori benturan kepentingan, dijelaskan bahwa pejabat publik kesulitan memisahkan antara kepentingan pribadi dan tugasnya sebagai pelayan publik, yang membuka celah untuk korupsi (Yuniningsih et al., 2023). Sehingga korupsi dan kolusi memiliki dampak destruktif yang masif, khususnya pada aspek identitas nasional (pudarnya kepercayaan pada institusi Negara).

Korupsi menciptakan citra negatif dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah, lembaga penegak hukum (seperti sistem peradilan pidana), dan birokrasi. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada institusi yang seharusnya melindungi dan melayani mereka, nilai-nilai kebangsaan seperti gotong-royong dan keadilan sosial akan sulit dipertahankan. Dengan demikian, praktik korupsi dan kolusi tidak hanya dipotret sebagai masalah moral tetapi telah menjadi masalah sistemik dan kronis di Indonesia, merusak tidak hanya tatanan

ekonomi dan hukum, tetapi juga menggerogoti pondasi identitas nasional (Klitgaard, 1988; Silviana et al., 2025). Korupsi bukan sekadar tindakan individual, melainkan fenomena yang telah melembaga (institutionalized). Marella Buckley; menyebutkan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan pribadi (Ridwan, 2014; Putra & Linda, 2022:14).

Korupsi dan kolusi melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial. Tindakan ini menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan, di mana segelintir elite korup menikmati keuntungan besar sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan (Octaviani et al., 2022). Hal ini merusak semangat kebersamaan dan persatuan, yang merupakan inti dari identitas bangsa. Korupsi mencoreng kehormatan bangsa di mata dunia. Ketika sebuah bangsa dikenal sebagai negara korup, hal itu tidak hanya menghambat investasi ekonomi tetapi juga merusak harga diri dan jati diri bangsa (Nur, 2019).

Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami bahaya korupsi dan hak-hak mereka (Fajri et al., 2024). Penguatan partisipasi

publik yaitu masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan, mulai dari penggunaan (dana desa) hingga kebijakan pemerintah (Azizah, 2021). Pengembangan budaya anti-korupsi dengan membangun budaya jujur dan berintegritas sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas sangat dibutuhkan. Meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan lembaga anti-korupsi, praktik korupsi masih merajalela di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa sektor pendidikan tidak luput dari korupsi, dengan kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan dana bantuan dan pengadaan sarana.

Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kurang ideal untuk pembentukan karakter. Oleh karena itu, jika karakter jujur tidak tertanam sejak dini, maka akan sulit untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas dan bebas korupsi di masa depan. Analisis situasi ini menegaskan bahwa permasalahan korupsi tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga harus ditangani dari akarnya, yaitu melalui pembentukan karakter sejak dini. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi praktis dan strategis

untuk mengatasi akar masalah tersebut, dengan berfokus pada generasi muda sebagai agen perubahan.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kegiatan pengabdian ini, antara lain; materi edukasi harus disajikan dalam format yang interaktif, relevan, dan menarik bagi generasi muda (remaja). Mereka tidak membutuhkan ceramah, tetapi aktivitas yang melibatkan mereka, seperti role-playing, simulasi, diskusi kelompok, kompetisi pembuatan poster/video, atau permainan edukatif. Materi harus dikemas dengan bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka, misalnya isu kejujuran di sekolah atau di rumah. Pelatihan bagi guru juga penting agar mereka dapat menjadi fasilitator dan melanjutkan program secara mandiri. Orang tua juga perlu diberikan pemahaman melalui sesi sosialisasi tentang cara menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas di lingkungan keluarga. Dengan perencanaan yang matang, kegiatan pengabdian ini tidak hanya akan menumbuhkan kesadaran, tetapi juga membentuk generasi muda yang berani, jujur, dan berintegritas, yang pada gilirannya akan menjadi garda

terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

Beberapa hasil studi, seperti Lee et al (2022), menyebutkan bahwa edukasi anti-korupsi membekali masyarakat dengan pengetahuan agar lebih sadar dan aktif melawan korupsi. Edukasi ini menjadi langkah pencegahan penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan. Edukasi ini sebaiknya diterapkan secara menyeluruh lewat sekolah, kampanye, dan pelatihan agar pesannya sampai ke semua orang. Begitu pula kajian Dairani et al (2022), menyebutkan bahwa melalui pendidikan generasi muda menjadi pribadi yang jujur, berilmu, dan sadar untuk tidak melakukan korupsi. Farida Sekti Pahlevi; juga menyebutkan dalam kajiannya bahwa perlu ada optimisme dalam upaya memberantas korupsi, seperti perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye harus ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Pahlevi, 2022).

Mencermati fakta empirik didasarkan pada kajian teoritis, sebagaimana dikemukakan, maka kegiatan pengabdian (PkM) yang direncanakan Tim pengabdian, yaitu memberikan sosialisasi kepada khalayak sasaran,

khususnya generasi muda, sehingga khalayak sasaran memiliki pandangan yang konstruktif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan; 1) Mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, khususnya karakter jujur, melalui serangkaian kegiatan interaktif seperti simulasi, diskusi kelompok, dan permainan edukatif, dengan tujuan agar nilai-nilai ini tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga diinternalisasi dan dipraktikkan; 2) Menanamkan pemahaman bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi penting dalam membangun identitas nasional yang kuat dan bermartabat.

#### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, berupa penayangan video pendek atau kuis interaktif) untuk memancing partisipasi peserta. Setiap sesi dimulai dengan aktivitas ringan, seperti kuis interaktif melalui platform digital, untuk mengukur pengetahuan awal siswa dan membangun suasana yang menyenangkan. Peserta diajak untuk memainkan peran dalam skenario yang menggambarkan dilema moral terkait korupsi, seperti kasus mencontek atau penyalahgunaan jabatan. Metode ini bertujuan melatih empati dan

pengambilan keputusan yang berintegritas. Peserta dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus nyata atau fiktif tentang korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Mereka akan diminta untuk mendiskusikan penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut. Metode pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan program berjalan efektif, interaktif, dan mencapai target luaran yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan dengan ceramah/sosialisasi, simulasi/role playing, dan diskusi (tanyajawab). Metode ini dirancang untuk menciptakan siklus yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur.

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah generasi muda (pelajar) SMK Daarun Ni'mah Bojongsari, Depok. Beralamat di Kp. Pondok Raya Bojongsari Kecamatan Bojongsari Depok. Secara demografis, Bojongsari, Depok. Yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang kompleks, dimana nilai-nilai moral dan etika perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda. SMK Daarun Ni'mah, sebagai institusi

pendidikan kejuruan di wilayah ini, memiliki populasi siswa yang signifikan dan heterogen. Mereka merupakan calon tenaga kerja dan pemimpin masa depan yang akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi praktik korupsi di dunia kerja. Melalui kegiatan pengabdian, satuan pendidikan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pusat percontohan bagi sekolah-sekolah lain dalam mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan PkM

Tahapan		Pelaksanaan
<b>I. Pra Pelaksanaan</b>	Pembentukan Tim Pelaksana	Mengorganisasi tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan pembagian tugas yang jelas (tim riset, tim materi, tim logistik, dan tim dokumentasi).
	Survei Awal & FGD	Melakukan survei dan FGD dengan khalayak sasaran untuk memahami persepsi mereka terhadap isu korupsi dan preferensi mereka terhadap metode pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan materi agar lebih relevan.

	Menyediakan Materi	Tim menyediakan bahan edukasi yang mencakup materi dasar korupsi, studi kasus yang relevan, serta lembar kerja dan aktivitas interaktif.
	Koordinasi - Mitra/Khalayak Sasaran	Menjalin komunikasi intensif dengan pihak mitra/khalayak sasaran yang telah ditentukan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan izin resmi, menyepakati jadwal kegiatan, dan menjelaskan peran serta tanggung jawab masing-masing pihak.
<b>II. Pelaksanaan</b>	<i>Ice Breaking &amp; Quiz</i>	Setiap sesi dimulai dengan aktivitas ringan, seperti kuis interaktif melalui platform digital, untuk mengukur pengetahuan awal siswa dan membangun suasana yang menyenangkan.
	<i>Role-Playing (Bermain Peran)</i>	Peserta diajak untuk memainkan peran dalam skenario yang menggambarkan dilema moral terkait korupsi, seperti kasus mencontek atau penyalahgunaan jabatan. Metode ini bertujuan



		melatih empati dan pengambilan keputusan yang berintegritas.
	Studi Kasus Kelompok	Peserta dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus nyata atau fiktif tentang korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Mereka akan diminta untuk mendiskusikan penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut.
<b>III. Evaluasi &amp; Pelaporan</b>	<i>Pre-test &amp; Post-test.</i>	Menggunakan instrumen <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Analisis perbandingan hasilnya akan menjadi data utama untuk mengukur dampak kegiatan pengabdian. Evaluasi formatif (selama proses kegiatan) dan evaluasi Sumatif (setelah program selesai).
	<i>Survei Kepuasan dan Perubahan Sikap.</i>	Menyebarkan <i>survei</i> kepada peserta untuk mengukur tingkat kepuasan mereka

		terhadap kegiatan PkM serta perubahan sikap yang terjadi.
	Penyusunan Laporan & Publikasi.	Menyusun laporan akhir kegiatan yang mencakup seluruh proses, hasil evaluasi, dan rekomendasi. Laporan ini akan menjadi dasar untuk publikasi ilmiah di jurnal atau seminar/diseminasi.

Ketika melaksanakan pengabdian tim melakukan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, untuk memastikan penilaian yang komprehensif. Dalam evaluasi formatif (selama proses kegiatan), yaitu; 1) dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau jalannya kegiatan pengabdian dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Maksudnya untuk memastikan metode dan materi yang digunakan efektif dan relevan; 2) Tim pelaksana mengamati secara langsung interaksi dan keterlibatan siswa selama sesi edukasi. Aspek yang diamati meliputi tingkat antusiasme, partisipasi dalam diskusi, dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Catatan observasi akan menjadi dasar untuk penyesuaian strategi pengajaran di

sesi berikutnya; 3) Melakukan wawancara informal dengan beberapa peserta setelah sesi selesai. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada kesan peserta terhadap metode pembelajaran, materi yang paling berkesan, dan bagian mana yang paling sulit dipahami; dan 4) Mengumpulkan umpan balik dari peserta atau pendamping yang bertugas sebagai fasilitator. Evaluasi ini mencakup masukan tentang efektivitas materi ajar, manajemen waktu, dan saran untuk perbaikan.

Sementara dalam evaluasi sumatif (setelah program selesai), dilakukan di akhir kegiatan pengabdian untuk mengukur dampak keseluruhan dan pencapaian target luaran yang telah ditetapkan (evaluasi pengetahuan dan sikap), yaitu 1) Menjalankan tes sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) kegiatan pengabdian. Instrumen tes akan dirancang untuk mengukur peningkatan pengetahuan siswa tentang korupsi dan pemahaman nilai-nilai anti-korupsi. Perbandingan nilai rata-rata dari kedua tes ini akan menjadi indikator kuantitatif utama dari keberhasilan program; dan 2) Menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pandangan/respon peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian.

Adapun bagan alir pelaksanaan pengabdian diilustrasikan seperti berikut.



Gambar 1. Alur Aktivitas PkM

Bentuk pemecahan masalah dalam aktivitas pengabdian dilakukan tim pengabdian, meliputi; 1) Sesi Edukasi Interaktif: Menggunakan metode pemantik diskusi (misalnya, video pendek atau kuis interaktif) untuk memancing partisipasi peserta. Pertanyaan-pertanyaan akan disesuaikan untuk membongkar miskonsepsi mereka tentang korupsi; 2) Studi Kasus Kontekstual: Menyajikan studi kasus fiktif yang relevan dengan lingkungan sekitar. Mereka diajak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah tersebut; 3) Permainan Peran (Role-Playing): Mengajak peserta memerankan berbagai peran (misalnya, pejabat, warga, atau jurnalis) dalam skenario yang melibatkan dilema moral terkait korupsi; dan 4) Pembuatan alat Kampanye: Mendorong peserta untuk membuat

produk kreatif yang menyampaikan pesan anti-korupsi, seperti poster/komik strip/ video pendek. Hasil karya terbaik dapat dipublikasikan di media sosial atau mading sebagai bentuk kampanye internal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berlokasi di SMKN 8 Kota Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari/tanggal: Jumat, 10 Oktober s.d Sabtu, 11 Oktober 2025. Tim pengabdian secara keseluruhan berjumlah 5 orang, terdiri dari 3 dosen (Ketua dan anggota) dan 2 mahasiswa (anggota). Dalam kegiatan pengabdian ini, dihadiri oleh warga sekolah (Kepala Sekolah, para guru, dan para siswa yang berjumlah 50 orang). Kegiatan pengabdian diawali dengan pembacaan do'a, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pengabdian. Mengawali sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Sekolah dan selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tim Pengabdian. Aktivitas pengabdian (PkM) dirancang dalam 2 (dua) sesi kegiatan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. Pemaparan materi PkM

### Sesi Ke-1

Pada sesi ini, tim pengabdian memberikan edukasi interaktif. Pada sesi ini tim menggunakan metode pemantik diskusi (misalnya, video pendek atau kuis interaktif) untuk memancing partisipasi peserta. Pertanyaan-pertanyaan akan disesuaikan untuk membongkar miskonsepsi mereka tentang korupsi. Materi yang disampaikan benar-benar relevan dan menarik bagi peserta. Setelah itu, dilanjutkan dengan Studi kasus kontekstual. Pada sesi ini tim pengabdian menyajikan kasus fiktif yang relevan dengan lingkungan sekitar. Para peserta diajak untuk berdiskusi dan mencari solusi atas masalah tersebut. Di sesi ini bertujuan agar muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan membongkar miskonsepsi mereka tentang korupsi. Tertanam nilai-nilai kejujuran, keadilan,

dan tanggung jawab dan pondasi integritas yang kuat, berkelanjutan, dan relevan bagi masa depan mereka.

#### Sesi Ke-2

Pada sesi ke-2, tim pengabdian mengajak peserta memerankan berbagai peran (misalnya, pejabat, warga, atau jurnalis) dalam skenario yang melibatkan dilema moral terkait korupsi. Pada sesi ini kegiatan bertujuan untuk melatih empati dan pengambilan keputusan yang berintegritas. Setelah aktivitas role playing selesai, dilanjutkan dengan pembuatan alat peraga. Dimana tim pengabdian mendorong seluruh peserta untuk membuat produk kreatif yang menyampaikan pesan anti-korupsi, seperti poster/video pendek. Hasil karya terbaik dari peserta dipublikasikan di media sosial atau mading sebagai bentuk kampanye internal (di sekolah).

Selama kegiatan, tim pengabdian mengamati secara langsung interaksi dan keterlibatan peserta selama sesi edukasi. Aspek yang diamati meliputi tingkat antusiasme, partisipasi dalam diskusi, dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Sehingga catatan observasi akan menjadi dasar untuk penyesuaian strategi pengajaran di sesi berikutnya. Selain itu juga, tim pengabdian

melakukan wawancara informal dengan beberapa peserta setelah sesi selesai. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada kesan peserta terhadap metode pembelajaran, materi yang paling berkesan, dan bagian mana yang paling sulit dipahami. Dan mengumpulkan umpan balik dari peserta atau pendamping yang bertugas sebagai fasilitator. Evaluasi ini mencakup masukan tentang efektivitas materi ajar, manajemen waktu, dan saran untuk perbaikan. Setelah itu, dilakukan evaluasi pada akhir kegiatan pengabdian untuk mengukur dampak keseluruhan dan pencapaian target luaran yang telah ditetapkan (evaluasi pengetahuan dan sikap).



Gambar 3. Evaluasi kegiatan PkM

Hasil pengabdian ini dapat diukur dari pencapaian target luaran yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan analisis perbandingan

antara nilai rata-rata pre-test dan post-test yang dilakukan pada 50 peserta, didapati adanya peningkatan skor rata-rata sebesar 25%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode dan materi yang disampaikan efektif dalam mentransfer pengetahuan dasar tentang korupsi. Selain itu, hasil kuesioner perubahan sikap menunjukkan bahwa 85% pelajar merasa lebih termotivasi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab setelah mengikuti kegiatan.

Dari total peserta, sebanyak 10 pelajar terpilih sebagai "Duta Anti-Korupsi Sekolah". Mereka dibekali dengan modul lanjutan dan pendampingan untuk melanjutkan kampanye anti-korupsi di lingkungan sekolah, seperti melalui mading, media sosial, dan diskusi kelompok kecil. Keberadaan duta ini memastikan bahwa pesan-pesan integritas tidak berhenti setelah program selesai, melainkan terus berlanjut dari teman sebaya ke teman sebaya. Tim pengabdian telah berhasil membuat dan menyerahkan modul edukasi anti-korupsi yang terstruktur, lengkap dengan skenario role-playing dan studi kasus kontekstual. Modul ini dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk program pendidikan karakter berkelanjutan. Selain itu, video dan

poster kampanye hasil karya siswa juga menjadi luaran yang dapat digunakan sebagai alat diseminasi efektif di media sosial.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari pendekatan yang strategis dan relevan dengan karakteristik para pelajar SMK. Hasil yang signifikan, terutama dalam peningkatan pemahaman, sangat didukung oleh metode pelaksanaan yang interaktif dan partisipatif. Daripada metode ceramah yang pasif, program ini menggunakan role-playing dan studi kasus yang memaksa siswa untuk berpikir kritis dan merasakan langsung dilema moral yang terkait dengan korupsi. Dengan mengaitkan korupsi dengan masalah yang dekat dengan mereka—seperti kecurangan dalam pemilihan ketua kelas atau penggunaan uang kas yang tidak transparan—materi menjadi terasa nyata dan relevan, tidak lagi abstrak. Keberhasilan program ini juga memvalidasi landasan teori yang kami gunakan, yaitu teori perkembangan moral Kohlberg.

Pada usia remaja, pelajar berada pada fase di mana mereka mulai menginternalisasi nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Intervensi edukasi di usia ini sangat

signifikan karena nilai-nilai yang ditanamkan akan menjadi fondasi bagi karakter mereka di masa dewasa. Hal ini menjadikan mereka target yang paling strategis untuk upaya pencegahan korupsi jangka panjang. Dengan demikian, secara keseluruhan, hasil pengabdian ini membuktikan bahwa edukasi anti-korupsi sejak dini bukan hanya sekadar teori, melainkan strategi yang efektif untuk membangun pondasi integritas pada generasi muda, yang pada akhirnya akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan jujur.

Dengan demikian, edukasi anti-korupsi sejak dini (PAK) adalah upaya sistematis dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan pemahaman tentang bahaya korupsi kepada peserta didik dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa perilaku koruptif tidak muncul tiba-tiba, melainkan berakar dari kebiasaan abai terhadap hal-hal kecil, seperti mencontek atau menyepelekan aturan (Medio Venda, dalam KPK, 2025). Jadi, tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini yaitu membentuk karakter (dimensi moral) dan meningkatkan literasi anti-korupsi

(dimensi pengetahuan) pada generasi penerus bangsa. Pendidikan anti-korupsi bertindak sebagai "vaksin moral" yang membangun benteng etika diri. Siswa diharapkan tumbuh sebagai superhero yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Generasi muda, terutama mahasiswa dan pelajar, disiapkan untuk menjadi motor penggerak dan pengawas sosial yang mampu menolak dan melaporkan praktik-praktik korupsi di lingkungan mereka. Dengan menyadari bahwa korupsi merusak sendi-sendi kehidupan, PAK bertujuan memutus rantai buruk yang dimulai dari kecurangan kecil di sekolah hingga penyalahgunaan wewenang di masa depan.

Oleh karena itu, implementasinya dilaksanakan melalui dua pendekatan utama: Integrasi Kurikulum dan Pembiasaan/Ekosistem Berintegritas. Integrasi Kurikulum (insersi). Pendidikan anti-korupsi disisipkan ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru. Sementara pembiasaan dan ekosistem berintegritas adalah aspek terpenting, yaitu

menjadikan nilai-nilai anti-korupsi sebagai budaya sekolah dan kampus, melalui penggunaan media kreatif seperti film, drama, dan simulasi dilema etis, guru, kepala sekolah, dan orang tua adalah aktor kunci yang harus menjadi teladan langsung, karena anak-anak berkembang melalui proses meniru (role model). Melibatkan siswa dalam kegiatan nyata, seperti mengelola kas sosial kelas (untuk menumbuhkan tanggung jawab dana umum) atau mengumpulkan beras seikhlasnya (untuk meningkatkan kepedulian).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan tim pengabdian, diperoleh kesimpulan, bahwa berdasarkan analisis perbandingan antara nilai rata-rata pre-test dan post-test yang dilakukan pada 50 peserta, didapati adanya peningkatan skor rata-rata sebesar 25%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode dan materi yang disampaikan efektif dalam mentransfer pengetahuan dasar tentang korupsi. Selain itu, hasil kuesioner perubahan sikap menunjukkan bahwa 85% peserta termotivasi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab setelah mengikuti kegiatan. Dari total

peserta, sebanyak 10 peserta terpilih sebagai "Duta Anti-Korupsi Sekolah". Selain itu, video dan poster kampanye hasil karya siswa juga menjadi luaran yang dapat digunakan sebagai alat diseminasi efektif di media sosial.

## SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kedepan dapat dilakukan berkesinambungan dengan pemberian ilmu yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk Warga masyarakat yang sudah menerima ilmu dari pengabdian ini bisa membagikan kepada masyarakat yang belum menerima penyuluhan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16-30.
- Aiman, R. (2025). Korupsi, Distorsi Belanja Pendidikan, dan Peran Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(2), 306-321.
- Ambarwati, D., & Assiddiq, D. U. (2022). "AKSIAP" Sebagai Inovasi Model Pendidikan Antikorupsi Berbasis Karakter. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 4(1), 8-24.
- Azizah, C. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan

- Good Governance (Studi Kasus Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Dairani, D., Fathorrahman, F., & Nisa, F. M. (2022). Implementasi pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi anti korupsi di sekolah dasar. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 64-71.
- Fajri, M. R., Aulia, P., Puspita, S. B., Widiyatma, D., Rohali, R. D. A., & Supriyono, A. S. (2024). Edukasi Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Anti Korupsi. *Panggung Kebaikan: Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(4), 32-42.
- Hadjar, I. (2023). *Keberagamaan dan Perilaku Menyontek Calon Guru*. Penerbit Lawwana Semarang.
- Hambali, G. (2020). Evaluasi program m pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31-44.
- Hermawan, A. W., & Pramana, Y. (2022). Addressing the Financial Reporting Fraud: A Rational Choice Theory Perspective. *The Scientia Journal of Social and Legal Studies*, 1(2), 77-104.
- Inayah, S., Munawaroh, M., & Yani, A. (2025). *Mendidik Tanpa Korupsi. Sumatera Barat: U ME Publishing*.
- Lee, A., Angeline, A., Caroline, C., Fransiska, F., Jannice, J., Candra, R., & Yopie, S. (2022, September). Peningkatan kesadaran diri melalui gerakan anti korupsi dan integritas terhadap generasi muda. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 473-479).
- Mallawa, K. K., & Damayanti, T. W. (2023). Korupsi Dan Kepatuhan Pajak: Peran Kontekstual Edukasi Wajib Pajak (Corruption and Tax Compliance: The Contextual Role of Taxpayer Education). *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 30(1), 34-49.
- Nur, S. M., & Ningsih, R. (2019). Korupsi mendegradasikan nilai etika Pancasila. In *Forum Ilmiah Jurnal Bunga Rampai* (Vol. 16, No. 3, pp. 242-252).
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44-44.
- Octaviani, A., Hanifah, A., & Apriliya, D. (2022). Tindakan Korupsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Pancasila. *Warta Dharmawangsa*, 16(1), 75-83.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A challenge for social changes. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13-24.
- Silviana, A., Jafar, A. R., Damanik, P., Hasjad, H., Iskandar, S., Abqoriya, R., ... & Sary, W. E. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi*.



- Padang: CV. Gita Lentera. 13(2), 301-310.
- World Bank Group, & Database, C. (2020). CPIA transparency, accountability, and corruption in the public sector rating (1=low to 6=high).
- Yuniningsih, T., Susniwati, S., Herawati, A. R., Larasati, E., & Suwitri, S. (2023). Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi. *Reformasi*, 13(2), 301-310.
- Yunus, N. R., Hidayat, A. S., & Helmi, M. I. (2024). *Meredam Budaya Korupsi*. Deepublish.
- Zaman, A. Q., Irnawati, I., Sari, M. M. K., Ainni, N., & Khitiah, M. (2024). Keluarga Bersih dari Korupsi: Strategi Pendidikan dan Kesadaran Anti-Korupsi (PPM di LLDIKTI VII). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4945-4953.